DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Aminah, Siti, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta: Kencana, 2014.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Edisi 1, Cetakan ke-7.

Astawa, I Gde Pantja, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, 2013.

Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan.

Budiman, Hendra, *Pilkada Tidak Langsung & Demokrasi Palsu*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Ence, Iriyanto A. Baso, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: P.T. Alumni, 2008.

Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Haris, Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Jakarta: LIPI Press, 2007.

Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Edisi 1, Cetakan ke-5.

Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Ishom, Muhammad, *Pengantar Legal Drafting (Taqnin Al-Ahkam*), Serang: Lemlit IAIN SMHB, 2014.

Khaleed, Badriyah, *Mekanisme Judicial Review*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Labolo, Muhadam, *Memahami Ilmu pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenanda Media, 2015, Cetakan ke-10, Edisi Revisi.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Pamungkas, Sri Bintang, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total*, Jakarta: Erlangga, 2001.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Rosyada, Dede, dkk., (ed.) *Pendidikan Kewargaan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Edisi 2, Cetakan Kedua.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sumadi, Ahmad Fadlil, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi: Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan*, Malang: SETARA Press, 2013.

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syahuri, Taufiqurrohman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syarbaini, Syahrial, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Jurnal, Skripsi dan Tesis:

Ryna Frensiska, "*Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Implikasi terhadap Calon Perseorangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Jurnal *Rechtsvinding*: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vo. 4, No. 1, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan: 2015.

Warjiyati, Sri, *Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*,, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 1, UIN Sunan Ampel: 2014.

Yanto, Hendri Budi, skripsi berjudul*: Implikasi Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilikada*

Kabupaten Bengkulu Selatan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Yusdianto, *Identifikasi Otensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*, Jurnal konstitusi Vol II Nomor 2.

Peraturan Perundang-undangan:

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaa Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.